

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di era informasi dan teknologi yang semakin maju, perubahan dinamis dalam masyarakat, dan perkembangan berbagai isu global, tugas penegakan hukum pidana semakin rumit. Tantangan paling pokok adalah bagaimana menjaga ketertiban sosial sekaligus tetap menghormati hak-hak dasar individu. Keseimbangan ini menjadi esensial untuk memastikan bahwa hukum dijalankan secara adil dan efektif. ¹Dalam upaya untuk menjaga keadilan dalam penegakan hukum pidana, penting untuk memahami bahwa kompleksitas ini tidak hanya mencerminkan tantangan teknis, tetapi juga moral dan etika. Bagaimana hukum dan kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan perlindungan maksimal bagi hak-hak individu sambil tetap mengakui pentingnya menjaga ketertiban masyarakat adalah pertanyaan yang semakin mendesak di era ini. Semua ini menjadikan penegakan hukum pidana menjadi salah satu arena yang paling memerlukan pemikiran kritis dan solusi inovatif dalam konteks masyarakat yang terus berubah. Penegakan hukum pidana adalah sebuah ranah yang saat ini berada dalam fokus perhatian yang semakin intens. ²Dalam era *modern* ini, penegakan hukum pidana menghadapi kompleksitas dan tantangan yang mengharuskan perannya semakin rumit. Dalam konteks ini, salah satu tantangan utama yang harus dihadapi adalah menemukan keseimbangan yang tepat antara perlindungan hak asasi manusia individu dan kepentingan publik yang bersifat lebih luas. Studi ini bertujuan untuk menjelajahi konflik yang muncul di dalam domain penegakan hukum pidana, yang melibatkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kebutuhan masyarakat untuk menjaga ketertiban. Untuk memahami secara lebih mendalam konflik

¹ Yulianto Kadji. (2016). Metode Penelitian Ilmu Administrasi. Deepublish.

² Wardhana, D. (2017). Fair Trial Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia. Universitas Islam Indonesia.

ini, kami akan menyajikan beberapa kasus hukum pidana kontemporer yang menampilkan perjuangan dunia nyata dalam menyeimbangkan perlindungan hak individu dan kepentingan Masyarakat. Dalam analisis ini, penulis akan menggali dampak yang dihasilkan oleh kebijakan-kebijakan penegakan hukum pidana terhadap hak asasi manusia individu di dalam masyarakat. Pengkajian ini akan menyoroti kompleksitas relasi antara hukum dan individu. Saat kebijakan penegakan hukum pidana diimplementasikan, mereka seringkali memiliki efek yang menciptakan ketegangan berat antara perlindungan hak-hak individu yang dijamin oleh hukum dan kebutuhan mendesak untuk menjaga ketertiban sosial.³

Temuan dalam penelitian ini akan mengeksplorasi dampak-dampak konkret yang muncul dari kebijakan penegakan hukum pidana, menyoroti situasi di mana hak-hak asasi manusia individu mungkin terancam atau terbatas dalam rangka menjaga keamanan masyarakat. Keberlanjutan ketegangan ini menjadi perhatian utama dalam merumuskan kebijakan yang memadukan hak asasi individu dengan kepentingan publik yang lebih luas. Penulis juga akan mengupas lebih dalam bagaimana peraturan dan tindakan penegakan hukum berdampak pada masyarakat secara keseluruhan, sambil mempertimbangkan dampak yang lebih luas pada citra dan kepercayaan terhadap lembaga penegakan hukum. Dalam konteks yang semakin kompleks dan serba cepat, memahami dinamika ini menjadi esensial dalam upaya kita untuk merancang sistem penegakan hukum yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, sambil menjaga ketertiban sosial yang diperlukan. Penelitian ini secara khusus akan menghadirkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana penegakan hukum pidana dapat memiliki dampak substansial pada hak asasi manusia dalam realitas dunia yang semakin kompleks. ⁴Dengan demikian, pemahaman

³ Nur Kholis. (2018). "Asas Non Diskriminasi dalam Contempt of Court", Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 26, Nomor 2.

⁴ Muladi (editor), 2005. Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung: PT Refika Aditama.

yang lebih baik tentang keseimbangan ini akan membantu kita dalam mengambil tindakan yang lebih tepat dan efektif dalam menangani konflik di antara hak asasi manusia dan kepentingan publik dalam ranah penegakan hukum pidana⁵

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Dampak Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia Individu di dalam Masyarakat?
2. Bagaimana Masalah yang Muncul Dalam Upaya Menjaga Keseimbangan antara perlindungan Hak Individu dan Kepentingan Publik dalam konteks Penegakan Hukum Pidana yang Kompleks dan Dinamis?

C. TUJUAN PENELITIAN

Untuk Adapun tujuan dari penelitian yang terkait dengan penulisan berjudul **Dampak Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia dan Kepentingan Publik : Studi Kasus Kontemporer** adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Dampak Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia Individu di dalam Masyarakat.
2. Untuk mengetahui, Masalah yang Muncul Dalam Upaya Menjaga Keseimbangan antara perlindungan Hak Individu dan Kepentingan Publik dalam konteks Penegakan Hukum Pidana yang Kompleks dan Dinamis.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam penelitian ini, adapun manfaat atas penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian penulisan hukum ini tidak lain untuk memperoleh gelar akademik Strata-1 di bidang Ilmu Hukum dan dengan tujuan mengetahui, memahami,

⁵ Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana dan Muhammad Fedryansyah. (2015). "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak", Prosiding KS: Riset dan PKM. Volume 2 Nomor 1. Diakses dari <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13235>

serta menganalisa Dampak Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia dan Kepentingan Publik.

2. Bagi masyarakat, penelitian penulisan hukum ini adalah untuk memberikan sumbangsih wawasan dan edukasi kepada publik yang membahas tentang Dampak Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia dan Kepentingan Publik.
3. Bagi pemerintah, pemelitan penulisan hukum ini bertujuan untuk memberikan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman kepada hukum terkait Dampak Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia dan Kepentingan Publik.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan teoritis, penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan tentang Dampak Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia dan Kepentingan Publik.
2. Kegunaan praktis, penelitian hukum ini diharapkan dapat dijadikan pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan tentang Dampak Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia dan Kepentingan Publik.

F. METODE PENELITIAN

Dalam metodologi penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk menjelaskan gambaran yang mendalam mengenai dampak kebijakan penegakan hukum pidana terhadap hak asasi manusia individu di dalam masyarakat. Pendekatan analisis konten dipilih untuk memahami interaksi kompleks antara kebijakan penegakan hukum, hak asasi manusia, dan kepentingan publik dalam konteks penegakan hukum pidana yang kompleks dan dinamis. Fokus penelitian ditujukan pada konflik antara hak asasi manusia dan kepentingan publik dalam penegakan hukum pidana.

Dalam metode penelitian ini, *case approach* yang digunakan mencakup pemilihan kasus-kasus hukum pidana kontemporer sebagai studi kasus. Kasus-kasus ini dipilih karena

mereka mencerminkan konflik yang kompleks antara perlindungan hak asasi manusia individu dan kepentingan masyarakat dalam konteks penegakan hukum pidana. Melalui analisis kasus-kasus ini, peneliti berusaha untuk memahami secara mendalam bagaimana kebijakan penegakan hukum pidana memengaruhi hak asasi manusia individu dan kepentingan publik.

Peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk mendukung data yang diperoleh baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi terkait kasus-kasus hukum pidana yang dipilih sebagai studi kasus. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis data menggunakan model interaktif, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi pola-pola, perbedaan, dan kesamaan dalam implementasi kebijakan penegakan hukum pidana dalam konteks hak asasi manusia dan kepentingan publik.

Sumber data yang digunakan terdiri dari wawancara dan berbagai dokumen resmi terkait dengan kasus-kasus hukum pidana yang telah terpilih sebagai studi kasus, termasuk putusan pengadilan, laporan investigasi, serta kebijakan dan peraturan penegakan hukum yang relevan. Data ini menjadi landasan utama untuk menganalisis dampak kebijakan penegakan hukum pidana pada hak asasi manusia dan kepentingan public. Melalui pendekatan ini, peneliti berharap memberikan kontribusi substansial pada pemahaman kompleksitas konflik antara hak asasi manusia dan kepentingan publik dalam konteks penegakan hukum pidana di dunia yang semakin kompleks.